



JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA

e-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857

Website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP>

Faculty of Politics Governance, Governance of Home Affairs (IPDN)

JPPDP, Vol 15 No. 2

Doi: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i2.2775>

PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN DI DESA ARJASARI KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA

Gaston Otto Malindir^{1*}, Aldi Budi Mashudi²

¹Universitas Padjajaran, Jalan Bukit Dago Utara No. 25, Bandung-Jawa Barat

²Universitas Jenderal Achamad Yani, Jl. Ters. Jenderal Sudirman, Cimahi,-Jawa Barat

Email: otto.malindir@gmail.com¹, aldibm136@gmail.com²

*corresponding author

E-mail: otto.malindir@gmail.com

Abstract

Empowerment of farmer groups is a series of activities carried out to improve the knowledge and skills of farmers through training and counseling in order to create independent and competitive farmers. The phenomenon found in the field is the lack of knowledge and skills of farmers in applying technological innovations and the incapacity of farmer groups resulting in the yield of production fluctuating or going up and down every harvest season. The purpose of this study is about empowering farmer groups by the Arjasari Village Government using empowerment theory with indicators of human development, business development, environmental development and institutional development. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques literature study and field studies through interviews and observations. The results of the study based on the four indicators did not run optimally because there were no capacity building efforts carried out by the Village Government either through training or counseling, while several obstacles to implementing farmer group empowerment were lack of attention, budget constraints, and weak partnership network development. The author gives advice to the Village Government to conduct training and counseling to farmer groups regularly and gradually in order to achieve independence and welfare of farmers.

Keywords: Empowerment, Farmer Groups, Village Government

Abstrak

Pemberdayaan kelompok tani adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu petani menjadi lebih berpengetahuan dan kompetitif dengan memberikan mereka pelatihan dan penyuluhan. Fenomena lapangan antara lain kurangnya pengetahuan dan keterampilan inovasi teknologi petani, serta ketidakberdayaan kelompok tani yang menyebabkan produksi tanaman fluktuatif atau berfluktuasi setiap musim panen. Dengan menggunakan teori pemberdayaan dan indikator pengembangan manusia, usaha, lingkungan, dan kelembagaan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pemerintah Desa Arjasari telah memberdayakan kelompok tani. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dari literatur dan studi lapangan. Hasil temuan menunjukkan bahwa kinerja keempat indikator tersebut di bawah standar karena pemerintah desa kurang berupaya meningkatkan kapasitas melalui pelatihan atau penyuluhan, serta kurangnya perhatian, keterbatasan anggaran, dan lemahnya pengembangan jaringan kemitraan yang menghambat implementasi petani. pemberdayaan kelompok. Penulis menyarankan agar Pemerintah Desa memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok tani secara berkala dan bertahap untuk membantu mereka mencapai kemandirian dan meningkatkan kesejahteraannya.

Kata kunci: Pemberdayaan, Kelompok Tani, Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Peran pemerintah adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang mana menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional maupun kesejahteraan masyarakat (Ahmar et al., 2016).

Menurut Usman (Mangowal., 2013) bahwa salah satu strategi penting dalam pembangunan adalah pentingnya pemberdayaan pada masyarakat. Upaya memberikan daya dan kekuatan masyarakat disebut pemberdayaan. Salah satu strategi pemerintah dalam pembangunan nasional adalah memberdayakan masyarakat petani, khususnya di bidang agraria, yang menjadi sumber kekuatan ekonomi masyarakat dan negara (Mutmainna dkk., 2016).

Karena Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai peternak, keterlibatan kelompok peternak seharusnya menjadi perhatian serius dari otoritas publik (Ratna dkk., 2007). Karena semua kegiatan dan masalah pertanian ditangani secara bersamaan oleh kelompok tani, mereka memainkan peran penting dalam masyarakat pertanian

sebagai tempat anggota dapat bekerja sama dan berorganisasi. Oleh karena itu, memberikan kelompok tani lebih banyak wewenang sangat penting jika mereka ingin berkembang menjadi kelompok tani yang lebih inovatif. yang semakin memperkuat struktur komunikasi antar tim penyuluh karena lebih mandiri. (Mutmainna dkk., 2016).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kawasan perdesaan, termasuk perkumpulan petani, harus dikembangkan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, ujung tombak sistem hirarki pemerintahan yaitu Pemerintah Desa berperan penting dalam mewujudkan pembangunan di desa, termasuk terciptanya komunitas petani (Nippi & M, 2019). Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pemberdayaan petani, ditingkatkan desa maka diperlukan peran aktif dari pemerintah desa salah satunya di Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kecamatan Tasikmalaya.

Kabupaten Tasikmalaya memandang sektor pertanian sebagai bagian terpenting yang menjadi salah satu program prioritas pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dan tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Bab VII yaitu dengan melalui peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan penerapan teknologi pertanian, peningkatan produksi dan program pemberdayaan pertanian, yang dilakukan melalui paradigma Desa Membangun atau sering disebut dengan Gerbang Desa (Nippi & Pananrangi, 2019).

Hal ini didukung dengan mayoritas penduduk Kabupaten Tasikmalaya berprofesi sebagai petani di pedesaan. Salah satu contohnya adalah Desa Arjasari di Kecamatan Leuwisari yang memiliki 2.680 petani dan buruh tani dari total penduduk 7.510 jiwa. Hal ini didukung oleh lahan pertanian seluas 295 hektar dari total luas 398 hektar. Alhasil, Desa Arjasari memiliki potensi di bidang industri pertanian. Dalam membantu pertumbuhan pertanian, keberadaan kelompok tani merupakan aset yang sangat berharga. Namun kelompok tani di Desa Arjasari masih belum berdaya karena masih banyak anggota yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, bahkan di dalam kelompok tani pun jarang bertemu sesering yang seharusnya (Mutmainna dkk., 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pada dasarnya Pemerintahan Desa

memiliki empat kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul (pengakuan), kewenangan berskala lokal (subsidiaritas), kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, dan kewenangan lain yang diberikan oleh Pemerintah Desa. pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau kota. Pemberdayaan masyarakat desa didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan. disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi dan prioritas kebutuhan masyarakat. (Nuryanti dkk., 2011).

Berdasarkan data awal yang peneliti dapatkan bahwa dalam tiga tahun terakhir setidaknya terdapat peningkatan hasil produksi pertanian yang signifikan khususnya di Desa Arjasari. Adapun data peningkatan hasil produksi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Panen Produksi Kelompok Tani di Desa Arjasari

No	Kelompok Tani	2019		2020		2021
		Panen -1	Panen -2	Panen -1	Panen -2	Panen -1
1	Rukun Tani Mukti	533,05	598,51	533,05	840,08	648,26
2	Pusaka Tani	378,57	425,03	378,57	596,58	460,36
3	Mulyasari	332,22	372,98	332,22	523,53	403,99
4	Sinar Bahagia	316,77	355,63	316,77	499,18	385,20
5	Sinar Gumbira	324,49	364,31	324,49	511,35	394,59
6	Rempug Jukung	231,78	260,22	231,78	365,25	281,85
Jumlah		2.116,92	2.376,68	2.116,92	3.335,95	2.574,23

Sumber: Badan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Leuwisari, (2021)

Permasalahan ini berakibat kepada hasil panen produksi yang didapatkan oleh Kelompok Tani di Desa Arjasari, hal ini dapat dilihat dari tabel diatas musim panen ke satu tahun 2020 produksi panen mengalami penurunan sekitar 259,76 ton dibandingkan musim panen sebelumnya, tetapi pada musim panen ke dua tahun 2020 mengalami peningkatan produksi panen yang cukup besar dengan total produksi panen 3.335,95 Ton yang selanjutnya mengalami penurunan kembali pada musim panen ke satu tahun 2021.

Begitu juga hasil panen yang didapatkan oleh setiap kelompok tani semuanya mengalami kenaikan dan penerunan setiap musim panenanya. Hasil panen tertinggi di dapatkan oleh kelompok tani Rukun Tani Mukti pada tahun 2020 musim panen ke dua dengan jumlah 840,08 ton, sedangkan hasil produksi panen paling sedikit yaitu kelompok tani Rempug Jukung dengan total produksi panen 231,78

ton pada musim panen ke satu tahun 2019 dan tahun 2020.

Selain untuk menentukan pembaharuan yang diberikan oleh penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi awal. “Pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng” menjadi judul kajian awal (Mutmainna dkk., 2016), dimana temuan kajian menunjukkan bahwa pemukiman, penguatan, dan pengamanan merupakan sarana pemberdayaan kelompok tani. . Di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, minimnya teknologi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat menjadi kendala dalam pemberdayaan ini. Hasil penelitian kedua sebelumnya yang berjudul “Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani dengan studi kasus di Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten

Barru” (Nippi & Pananrangi, 2019).menunjukkan bahwa pemerintah desa Siawung telah menerapkan strategi cukup baik, meskipun faktanya tidak seideal yang seharusnya.

Temuan penelitian ini yaitu adanya dan keberdayaan kelompok tani berkontribusi terhadap pendapatan usaha tani melalui penyediaan sarana produksi pupuk bersubsidi, peningkatan pengetahuan tentang teknik pertanian dan pengendalian hama penyakit bawang merah, akses permodalan dari Gapoktan dan KUD, memfasilitasi informasi tentang lahan sawah yang dilelang di harga yang lebih murah dari harga jual padi sawah pada umumnya, serta kemudahan informasi tentang bantuan pemerintah baik permodalan maupun sarana produksi, sejalan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Pemberdayaan kelompok tani dalam peningkatan usahatani bawang merah (Studi kasus

Berikut kajian sebelumnya, “Peran Pemda dalam Pemberdayaan Kelompok Tani untuk Meningkatkan Hasil Padi” (Agung, 2019)., menjelaskan bahwa pemerintah telah bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kelautan untuk menyediakan sarana pertanian seperti mesin bajak (Jetor). , mesin pompa air, pupuk bersubsidi, benih, dan mesin perontok padi dengan bermitra dengan

Penyuluh Pertanian (PPL) untuk melakukan penyuluhan kepada petani. “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow,” penelitian terbaru sebelumnya (Raintung et al., 2021), dimana temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam memberdayakan kelompok tani di Desa Mobuya belum tergarap secara maksimal sebagai akibat dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap kelompok tani, kurangnya keaktifan, dan keterlibatan langsung dalam mengamati kendala yang dihadapi kelompok tani dalam hal permodalan, sarana pertanian, dan infrastruktur, serta distribusi bantuan yang tidak merata kepada kelompok tani.

Pemberdayaan kelompok tani oleh pemerintah daerah merupakan aspek penelitian yang akan dilakukan yang sebanding dengan penelitian sebelumnya. Sebaliknya, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu pada pemberdayaan untuk tujuan peningkatan hasil pertanian. Selain itu, lokasi penelitian yang akan dilakukan di Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya berbeda jauh. Oleh karena itu, berikut pertanyaan penelitian yang harus dijawab: Bagaimana kelompok tani di Desa Arjasari diberdayakan oleh pemerintah daerah untuk

meningkatkan hasil pertanian? Menurut Mardikunto (Ratna et al., 2007) peneliti akan melakukan pendekatan teoritis dalam upaya pemberdayaan saat menjawab pertanyaan dan memaparkan hasil temuan penelitian. 2007 yang terdiri dari 4 indikator diantaranya; Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan.

TINJAUAN TEORITIS

Pemberdayaan Kelompok Tani

Junaidi (dalam Mutmainna dkk., 2016) mengklaim bahwa kata “Pemberdayaan” sebenarnya berarti “memberikan kewenangan resmi atau kekuatan hukum untuk membuat seseorang mampu melakukan sesuatu”, dari sinilah kata “memberdayakan” berasal. Salah satu pengertian dari pemberdayaan adalah *capacity building for human development* atau proses *capacity building*. Selain itu, klaim Sulistiyani (2004:79); Tujuan pemberdayaan adalah untuk mengangkat harkat dan martabat seluruh anggota masyarakat dan umat. Upaya ini terdiri dari:

1. penyediaan berbagai masukan dan peningkatan jenjang pendidikan. memperkuat modal dan meningkatkan pendidikan dengan menggunakan fasilitas yang sudah dimiliki.

2. memberi energi dan memotivasi, guna meningkatkan kesadaran akan potensinya untuk mendorong pembangunan;
3. Meningkatkan potensi dan kekuatan sesuatu dengan mengambil langkah-langkah positif untuk memberdayakan atau mengembangkannya sesuai dengan tujuannya. (Kamuntuan et al., 2017)

Salah satu strategi pemberdayaan masyarakat yang paling efektif adalah kelompok tani. Di pedesaan, kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi informal yang berasal dari, dipimpin, dan melayani petani (Mutmainna et al., 2016). Mulyana (Nippi & M, 2019) menegaskan bahwa kelompok pada dasarnya adalah kumpulan dari dua atau lebih individu yang berkolaborasi pada tujuan bersama dan terlibat dalam interaksi yang relatif stabil dan terstruktur. Kemudian, menurut Wahyuni, gerombolan peternak adalah pertemuan untuk korespondensi antar peternak, serta diskusi untuk korespondensi antar peternak dan instansi terkait selama masa inovasi bergerak.

Kementrian Pertanian mendefinisikan kelompok tani sebagai wadah atau wadah dan kumpulan petani yang terorganisasi secara musyawarah satu sama lain dan memiliki kepentingan yang sama dalam suatu wilayah atau luasan lahan. Selain itu,

Departemen mendefinisikan prinsip kelompok tani, seperti yang ditunjukkan oleh definisi tersebut, yaitu:

1. Kesamaan kepentingan Kepentingan bersama yang tercermin dalam tujuan bersama berfungsi sebagai fondasi di mana kelompok tani dibangun. Tujuan dan metode untuk mencapainya ditentukan bersama. Dalam manajemen kelompok, tujuan dibagi dan didelegasikan sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Komunikasi antar anggota akan dipermudah dengan kesamaan wilayah atau penyebaran kesamaan. Jika jarak dan jumlah anggota kecil, komunikasi akan intensif, membuat kekompakan kelompok mudah terbentuk. Akibatnya, jumlah anggota produktif berkisar antara 10 hingga 25 orang.
3. Musyawarah Prinsip ini menjadi landasan bagi kelompok tani yang menghargai kepentingan setiap anggota. Sebagaimana dinyatakan dalam keputusan bersama, para anggota mengendalikan semua keputusan..

Pengembangan Hasil Pertanian

Peningkatan produk hortikultura di daerah pedesaan menghadapi kesulitan yang berbeda karena kepemilikan tanah yang tidak dapat disangkal dibatasi oleh peternak. Menurut Fauzi (2018) jumlah

petani kecil meningkat dari 10,80 juta pada tahun 1993 menjadi 13,66 juta pada tahun 2003. Pada tahun 2010 diperkirakan akan ada lebih dari 15 juta petani. Proses perubahan sosial terencana yang dikenal sebagai pembangunan kapasitas kelembagaan dimaksudkan untuk mendorong inovasi dan perubahan. Untuk memenuhi kebutuhan usaha taninya, proses transformasi kelembagaan pada petani harus mampu menjadikan kelembagaan sebagai bagian penting dari kehidupan mereka melalui penciptaan atau pengembangan kompetisi.

Perspektif tentang perubahan sosial terencana yang mempertimbangkan inovasi yang menyiratkan perubahan kualitatif dalam norma, pola perilaku, hubungan kelompok, dan persepsi baru tentang tujuan dan metode adalah pengembangan kapasitas kelembagaan petani. Unsur-unsur suatu lembaga dapat dijadikan parameter untuk menilai kapasitasnya (Esman, 1986):

- a. Adanya kepemimpinan;
- b. Adanya spesifikasi nilai-nilai, tujuan-tujuan dan metode-metode operasional;
- c. Adanya program;
- d. Adanya sumberdaya-sumberdaya; dan
- e. Terbentuknya struktur intern.

Menurut Sukino (Kaledupa et al., 2013) konsep pengembangan dapat

diterapkan untuk meningkatkan kreativitas. Ada dua cara untuk mengimplementasikan konsep pengembangan sumber daya manusia: pertama, sekolah formal dan perdagangan. Rute ini memberikan pengetahuan mendasar yang dapat diterapkan pada pertumbuhan pengetahuan tambahan. Jenis pendidikan yang kedua adalah nonformal, dan melibatkan pembelajaran keterampilan, sikap, dan pengetahuan baru melalui pelatihan. Dengan ide ini, kelompok tani dapat membuat usaha taninya lebih kreatif.

Kesimpulannya, tujuan kelembagaan kelompok tani telah terpenuhi, peran dan tanggung jawab kelembagaan telah dijalankan, inovasi kelembagaan telah terjadi, dan keberlanjutan kelembagaan menjadi ukuran kapasitas kelembagaan. Langkah-langkah aksi strategis dalam mengembangkan kelembagaan petani dilakukan dengan berbagai cara, menurut kajian Anantayu (Amelia, 2020) :

- a. Peningkatan dukungan penyuluhan pertanian;
- b. Peningkatan peran pihak luar;
- c. Peningkatan kedinamisan kelompok sebagai kelompok pembelajar;
- d. Peningkatan kapasitas petani; dan
- e. Peningkatan partisipasi petani dalam kelembagaan.

Dengan mendorong petani untuk

berpartisipasi dalam kelembagaan petani, kegiatan penyuluhan pertanian digunakan untuk membangun kapasitas kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian perlu dirancang dengan konten yang berfokus pada peningkatan kapasitas individu petani dan kelembagaan petani.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian kualitatif dan deskriptif ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fenomena kelompok tani yang diberdayakan dalam pengembangan hasil pertanian di Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. “Penelitian kualitatif merupakan sarana untuk menggali dan memahami makna yang dianggap oleh individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial atau manusia,” demikian dikemukakan oleh Creswell (Wisler, 2009).

Studi ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan catatan tertulis sebagai bagian dari studi literatur dan lapangan (Abubakar, 2021). Dalam penelitian ini digunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (Wisler, 2009), proses analisis data terjadi bersamaan dengan pengumpulan data, yang menandakan bahwa peneliti juga menganalisis data yang dikumpulkan di lapangan. Prosedur penyelidikan informasi

yang digunakan adalah pengurangan informasi, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bina manusia

Pemberdayaan masyarakat berfokus terutama pada pembangunan manusia. Upaya yang dilakukan antara lain pengembangan kapasitas individu berupa pengetahuan anggota kelompok tani dan peningkatan kualitas sumber daya berupa pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan. Dalam hal ini, pembangunan manusia yang dimaksud diarahkan pada individu petani.

Melihat hasil eksplorasi dan persepsi di lapangan, terlihat bahwa Human Improvement yang dilakukan Pemerintah Kota Arjasari terhadap tandan peternak belum terlaksana dengan alasan sebagian besar pelopor dan peternak tandan tidak pernah menyadarinya. dan menjumpai latihan-latihan yang dilakukan oleh Pemkot Arjasari, baik itu persiapan maupun pembinaan. Selama ini kelompok tani mendapat pembinaan dari Dinas Agribisnis Tasikmalaya yang dibantu secara cuma-cuma melalui BP3K dengan hampir tidak ada partisipasi dari pemerintah kota.

Kajian tersebut juga mengungkapkan bahwa petani di Desa Arjasari kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanian, khususnya dalam hal

inovasi teknologi pertanian, sebagai akibat dari pengabaian kelompok tani oleh pemerintah desa dan kurangnya sinergi dengan BP3K. Hasil produksi petani tidak dapat meningkat secara signifikan karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan. Pemerintah Desa Arjasari tidak mampu mendukung dan mengadaptasi rencana pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Arjasari. Kondisi tersebut tentunya akan menjadi faktor penghambat pembangunan sektor pertanian yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Secara spesifik, peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan penerapan teknologi, peningkatan produksi, dan pemberdayaan petani tidak akan terwujud.

Mengingat *Human Development* juga merupakan langkah awal dalam pemberdayaan petani dan menarik generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian di Desa Arjasari, salah satu faktornya adalah kurangnya minat generasi muda yaitu belum adanya kebijakan mengenai pemberdayaan dan pelatihan. petani muda, Pemerintah Desa Arjasari perlu memberikan perhatian yang besar dalam memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada kelompok tani.

Bina Usaha

Peningkatan usaha merupakan salah satu upaya yang signifikan dalam penguatan karena berdampak pada kerja ekonomi dan bantuan pemerintah. Chambers mengatakan bahwa pemberdayaan adalah konsep pembangunan ekonomi yang mencerminkan paradigma baru pembangunan partisipatif dan mencakup nilai-nilai sosial. Salah satu fungsi kelompok tani adalah memajukan ekonomi desa dengan mengembangkan potensi desa Arjasari dan mengembangkan usaha masyarakat sekitar untuk memberdayakan mereka. Kelompok tani merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang muncul dari masyarakat.

Pengembangan Usaha dalam rangka pemberdayaan petani di Desa Arjasari yang meliputi pengembangan infrastruktur dan pemasaran produk yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Arjasari sudah berjalan namun belum begitu baik, karena masih kurangnya pengembangan jaringan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Arjasari. pemerintah desa dengan pemangku kepentingan terkait seperti dengan BP3K, Dinas Pertanian, atau pihak swasta lainnya. Menurut temuan penelitian yang dilakukan di lapangan, hal ini dikarenakan masih kurangnya pembangunan jaringan infrastruktur. Menurut Herman, pemberdayaan yang

efektif memerlukan keterlibatan dan hubungan yang sinergis antara komponen pemangku kepentingan dengan fungsinya masing-masing.

Namun, pembangunan irigasi dan jalan desa oleh Pemerintah Desa Arjasari tidak berjalan sesuai rencana karena kekurangan dana, dan infrastruktur yang telah dibangun tidak dapat terpelihara dengan baik. Akibatnya, petani dan masyarakat berinisiatif melakukan pembangunan secara mandiri dan gotong royong. bekerja sama. Meskipun kios-kios input di Desa Arjasari sangat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pertaniannya, namun petani masih mengeluhkan ketiadaan atau kelangkaan pupuk, pestisida, dan pupuk bersubsidi. Jelas ini mempengaruhi efisiensi pengumpulan yang diperoleh oleh kelompok peternak. Kemudian masalah harga dalam pemasaran hasil pertanian, dimana hasil panen petani yang dijual ke agen atau pedagang tidak sesuai dengan biaya produksinya. Dalam hal ini, petani dan pemerintah desa tidak dapat mengakses teknologi informasi, sehingga petani tidak dapat beroperasi secara mandiri.

Riset yang dilakukan di lapangan juga mengungkap sejumlah kelemahan dalam upaya pengembangan bisnis Pemerintah Desa Arjasari, yang menunjukkan bahwa indikator tersebut

belum berjalan maksimal. Sesuai dengan kewenangannya, pemerintah wajib menyediakan sarana produksi pertanian seperti benih, bibit, pupuk, pakan ternak, pestisida, peralatan, dan mesin pertanian, sesuai dengan baku mutu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.

Pemerintah wajib memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani berupa pembelian langsung, penyimpanan hasil pertanian, dan penyediaan fasilitas akses pasar atau memfasilitasi pengembangan pasar bagi hasil pertanian yang dimiliki atau dikelola, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, yaitu terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani. oleh koperasi, kelompok tani, dan campuran keduanya. Dalam hal ini Pemerintah Desa Arjasari perlu lebih selektif dalam menyusun anggaran dan jaringan kemitraan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup warga Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya.

Bina Lingkungan

Penelitian yang dilakukan di lapangan mengungkapkan bahwa Community Development di Desa Arjasari kurang memperhatikan lingkungan sosial atau fisik dalam pemberdayaan kelompok tani. Kelestarian sumber daya alam dan

lingkungan menjadi perhatian utama lingkungan fisik, sedangkan kehidupan petani dan kelangsungan usaha menjadi perhatian utama lingkungan sosial. Melalui kepala daerah, Pemerintah Desa Arjasari mengimbau agar Kelompok Tani tidak berkembang di lahan produktif atau lahan hijau. Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan alih fungsi lahan terus berlanjut di Desa Arjasari. Pemerintah Desa Arjasari memelopori pengembangan perlindungan lahan pertanian sebagai sarana mengubah pola pikir masyarakat.

Menurut peneliti, untuk menghindari alih fungsi lahan di Desa Arjasari, imbauan ini masih belum ada; sebaliknya, perhatian serius harus diberikan untuk memberikan bimbingan, sosialisasi, pendidikan, dan contoh dari Pemerintah Desa itu sendiri untuk melestarikan dan melindungi lingkungan. Salah satu faktor penyebab meningkatnya alih fungsi lahan adalah jumlah penduduk yang terus meningkat di Desa Arjasari yang terletak dekat dengan pusat kota. Akibatnya, upaya Bina Lingkungan Pemerintah Desa Arjasari tidak seefektif yang seharusnya karena hanya fokus pada himbauan bukan memberikan arahan, edukasi, keteladanan kepada masyarakat, dan pengawasan terhadap keberlangsungan usaha pertanian.

Pembinaan pelestarian lingkungan yang dimaksud ialah menanamkan

kebiasaan masyarakat untuk dapat melestarikan lingkungannya agar masyarakat dapat berwirausaha dan mempertahankan lahan pertaniannya, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani bahwa pemerintah harus dapat menetapkan kawasan usaha tani, memberikan keringanan pajak bagi lahan pertanian produktif dan konsolidasi jaminan perluasan lahan pertanian yang berupa pengendalian alih fungsi lahan dan pemanfaatan lahan pertanian.

Bina Kelembagaan

Karena menyangkut pembangunan lain, penelitian di lapangan mengungkapkan bahwa pengembangan kelembagaan merupakan indikator pemberdayaan yang sangat strategis. Dalam hal ini, pengembangan kelembagaan tidak berhenti pada pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan; melainkan juga harus membahas bagaimana lembaga-lembaga ini dapat beroperasi secara efektif. Dapat dikatakan bahwa Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Desa Arjasari belum berfungsi secara optimal karena ketidakmampuan kelompok tani dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pembelajaran, kerjasama, produksi, dan pemberdayaan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai human development, diketahui selama proses observasi bahwa strategi Pemerintah Desa Arjasari dalam penguatan kelompok tani sebagai sarana pembelajaran tidak menghasilkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tani. melalui pelatihan dan penyuluhan. Sebagai sarana kerjasama, penguatan kelembagaan kelompok tani merupakan wadah untuk membangun relasi guna memenuhi segala kebutuhan kegiatan usaha tani anggotanya. Peneliti memperkuat kelompok tani sebagai sarana kolaborasi mendasarkan temuannya dari wawancara dan observasi untuk mengklasifikasikannya kurang optimal. Padahal, kelompok tani tersebut sudah saling mengenal dengan baik dan sering bekerja sama. yang dilakukan oleh anggota kelompok tani yang berlandaskan pada kondisi yang sama untuk meningkatkan produksi tanaman, namun kerjasama tersebut dibatasi oleh keahliannya, dan tidak ada kegiatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Membentengi tandan peternak untuk tujuan penciptaan bisa dikatakan tidak mencukupi, kapasitas kelompok peternak untuk memberikan kantor produksi dan yayasan secara mandiri belum dipahami, ketergantungan tandan peternak pada otoritas publik telah menjadi

hambatan. Berdasarkan wawancara dan analisis yang dilakukan peneliti, kelompok tani sering mengalami kesulitan dengan kemajuan teknologi dan pupuk, benih, dan pestisida. Mengawasi setiap kelompok tani atau petani yang telah mendapatkan bantuan pemerintah merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pemberdayaan kelompok tani oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan hasil tani di Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan kelompok tani oleh Pemerintah Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya yang bertujuan untuk meningkatkan hasil tani, memang belum terlaksana dengan baik. Masih kurang maksimalnya pemberdayaan tersebut dilihat dari empat indikator sebagai berikut:

1. Bina manusia yang menyangkut pelatihan dan pendidikan yang belum pernah dirasakan oleh setiap kelompok tani. Tidak adanya perhatian dan keikutsertaan dari pemerintah desa untuk memanfaatkan potensi desa melalui pemberdayaan kepada kelompok lain, selain itu kurangnya

koordinasi antara Pemerintah Desa Arjasari dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dari BP3K menyebabkan keberadaan Kelompok Tani tidak berjalan sebagaimana fungsinya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Arjasari yaitu dengan melakukan perencanaan untuk melakukan kegiatan pelatihan dan penyuluhan secara rutin kepada kelompok tani, serta bekerjasama dengan BP3K sebagai lembaga yang ahli dalam bidang pertanian.

2. Bina Usaha, sejauh ini Pemerintah Desa Arjasari sudah berusaha untuk memfasilitasi Petani dengan membangun prasarana berupa saluran irigasi dan jalan yang menuju ke area pesawahan melalui program JIDES, namun belum terealisasi secara merata. Upaya yang dilakukan yaitu dengan menambah anggaran dan memprioritaskan pemberdayaan kelompok tani serta mengembangkan jejaring dan kemitraan Pemerintah Desa untuk bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam sektor pertanian, yang di pertajam dengan melakukan pendampingan kepada kelompok tani agar bisa melakukan pemasaran melalui media sosial.

3. Bina Lingkungan, sejauh ini sudah ada upaya dari Pemerintah Desa Arjasari untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan alih fungsi lahan hijau, tetapi kurangnya kesadaran masyarakat berakibat alih fungsi lahan pertanian tetap terjadi. Kurangnya kepedulian dari masyarakat mengakibatkan alih fungsi lahan di Desa Arjasari tetap terjadi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Arjasari yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi secara rutin kepada masyarakat mengenai manfaat dari sektor pertanian, serta mempermudah usaha pertanian agar tercapainya kesejahteraan bagi para petani dan buruh tani.
4. Bina Kelembagaan, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Arjasari dalam melakukan penguatan kelompok tani yaitu dengan memberikan legalitas kepada Kelompok tani, tetapi hal ini tidak diimbangi dengan tindak lanjut untuk memperhatikan dan memberdayakan keberadaan dari kelompok tani. Adapun hambatan dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani yaitu kurangnya kepercayaan dari

Pemerintah Desa kepada para petani. Perlu adanya upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Arjasari terhadap bantuan yang sering diberikan oleh pemerintah, agar terwujudnya kemajuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ahmar, Mappamiring, & Parawangi, A. (2016). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani Padi di Desa Parumpanai Kecamatan Wasumpoda Kabupaten Luwu Timur. *Administrasi Negara*, 2(2), 120–136.
- Dindha Amelia. (2020). Optimalisasi Potensi Perekonomian Hasil Pertanian Melalui Strategi Pengembangan Tenaga Kerja Desa Banjarsari Gresik. *Jurnal BUDIMAS*, 21(1), 1–9. <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Fauzi, N. F. (2018). Potensi dan Strategi Pengembangan Pertanian Pada Kelompok Tani Sumber Klopo I. *Jurnal Agribest*, 02(02), 159–173.
- Kaledupa, N., Pattinama, M. J., & Lawalata, M. (2013). Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Produksi Padi Sawah di Desa Savana Jaya.

- Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 8(20), 162–177
- Kamuntuan, N., Ionda, V. Y., & Tampongangoy, D. L. (2017). Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Tolombukan Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(6).
- Lowisada, S. A. (2014). Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Usahatani Bawang Merah. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 3–17.
- Mangowal, J. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Di Desa Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 5(1)
- Mutmainna, I., Hakim, L., & Saleh, D. (2016). Pemberdayaan kelompok tani di kecamatan marioriwawo kabupaten soppeng. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 269–283.
- Nippi, A. T., & M, A. P. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru). *Meraja Journa*, 2(1), 35–47.
- Nuryanti, S., Dewa, D., & Swastika, K. S. (2011). Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 19(2), 115–128.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal governance*. 1(2), 1–9.
- Ratna, D., P., Wuradji, & Djazifa, M. (2007).Pemberdayaan Petani Melalui Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). *Diklus*, 16(2), 144–153.
- Soetarto, Simbolon, B., R., & Sebua, S. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Tani Padi. *Jurnal Governance Opinion*, 4(1), 150-163
- Wisler, A. K. (2009). ‘Of, by, and for are not merely prepositions’: teaching and learning Conflict Resolution for a democratic, global citizenry.

Intercultural Education, 20(2), 127–
133.
<https://doi.org/10.1080/14675980902922143>